

KPKNL
BONTANG



2
0
2
4

LAPORAN K I N E R J A

(Revisi ke-1)

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bontang

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
LATAR BELAKANG.....	7
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
ISU STRATEGIS.....	12
SISTEMATIKA LAPORAN.....	13
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA	14
RENCANA STRATEGIS	14
PERJANJIAN KINERJA.....	16
PENGUKURAN KINERJA	19
ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN KK	21
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	25
REALISASI ANGGARAN	46
INOVASI	49
PENGHARGAAN DAN ACHIEVEMENT	50
BAB IV	51
PENUTUP	51

KATA SAMBUTAN

“Secara keseluruhan kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang pada tahun 2024 berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bontang di Tahun 2024 tercatat sebesar 115,35% meningkat sebesar 0,52% dari tahun sebelumnya.”

Sebagai instansi di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bontang telah menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. KPKNL Bontang telah berkontribusi positif dalam menyumbangkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang DJKN sebesar **Rp8,802 M** atau **121,38%** dari target sebesar Rp7,251 M yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan visi Kementerian Keuangan, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KPKNL Bontang juga berperan dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang optimal melalui Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, Pensertipikatan BMN, Portofolio Aset serta Tindak Lanjut Pengelolaan BMN pada satker di wilayah kerjanya. Upaya pembinaan dilakukan secara berkesinambungan guna mengoptimalkan pemanfaatan atas aset negara secara maksimal sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Disamping itu, peran KPKNL Bontang juga dirasakan pemerintah daerah dalam upaya perbaikan kualitas piutang daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). KPKNL Bontang mendorong penyelesaian piutang melalui program *Crash Program* Keringanan Utang.

Penilai juga menjadi salah satu bagian yang berkontribusi besar dalam menghasilkan nilai BMN/BMD yang akuntabel dan profesional guna mengoptimalkan potensi Lelang dari penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN/BMD yang berdampak positif bagi seluruh Masyarakat.

Secara keseluruhan kinerja KPKNL Bontang Tahun 2024 berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun. Pengelolaan risiko juga sudah berhasil memitigasi dampak negatif terhadap pencapaian sasaran strategis.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2024 ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong kinerja kami selaku pengelola aset negara dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan negara yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024, KPKNL Bontang menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Bontang selama tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja milik Kepala KPKNL Bontang ditetapkan secara berjenjang dan *cascading* dari tujuan strategis DJKN. Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Visi DJKN

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Misi DJKN

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tujuan Strategis

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024

1. (Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;

4. (Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

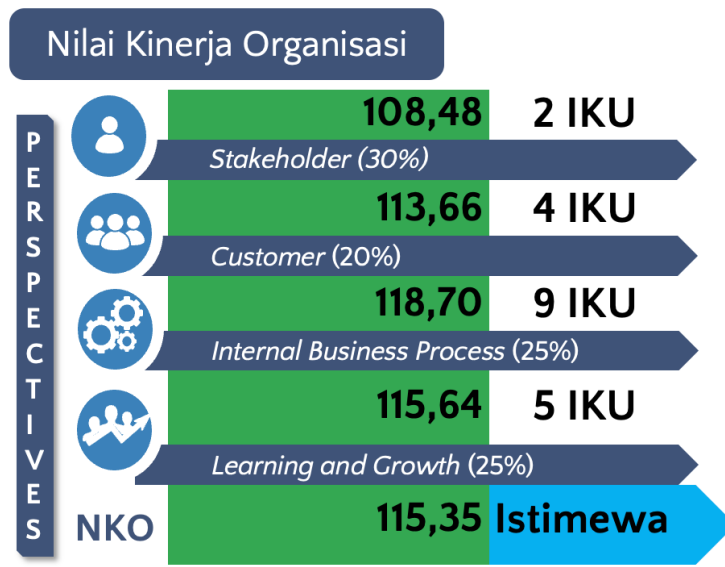
Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Bontang Tahun 2024 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategi tersebut terdiri dari sebelas sasaran strategis. Satu sasaran strategis pada stakeholder *perspective*, tiga sasaran pada customer *perspective*, dan empat sasaran pada masing-masing *internal process* serta *learning and growth perspective*.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Pengelolaan piutang dan lelang yang Optimal; (4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien; (5) Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif; (6) Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif; (7) Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional; (8) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; (9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel; (10) Komunikasi publik yang efektif; dan (11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Pada tahun 2024 ini dihasilkan 20 IKU pada level UPK- Three yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Secara umum, pencapaian IKU pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. **Pencapaian IKU KPKNL Bontang terdiri dari 20 IKU berstatus hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,35% predikat Istimewa.**



Predikat NKO:
 a. $NKO > 100$ = Istimewa
 b. $90 \leq NKO \leq 100$ = Baik
 c. $70 \leq NKO < 90$ = Butuh Perbaikan
 d. $50 \leq NKO < 70$ = Kurang
 e. $NKO < 50$ = Sangat Kurang

Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, KPKNL Bontang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui Pelaksanaan Monev Keberlanjutan ZI WBBM sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

Disamping itu, kegiatan Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Risiko Organisasi juga konsisten dilakukan per tiap triwulan sebagai upaya maksimal dalam penggalan *early warning system* dalam memitigasi risiko bisnis.

Selanjutnya, berbagai pencapaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari penguatan serta peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh jajaran KPKNL Bontang juga harus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja, serta terus-menerus mengupayakan perbaikan.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

KPKNL Bontang merupakan instansi vertikal di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai instansi vertikal, KPKNL Bontang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Fungsi KPKNL

- a) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- e) pelaksanaan pelayanan lelang;
- f) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL, terdapat subbagian, seksi serta jabatan fungsional yang memiliki tanggungjawab berbeda-beda. Struktur organisasi pada KPKNL Bontang terdiri atas :

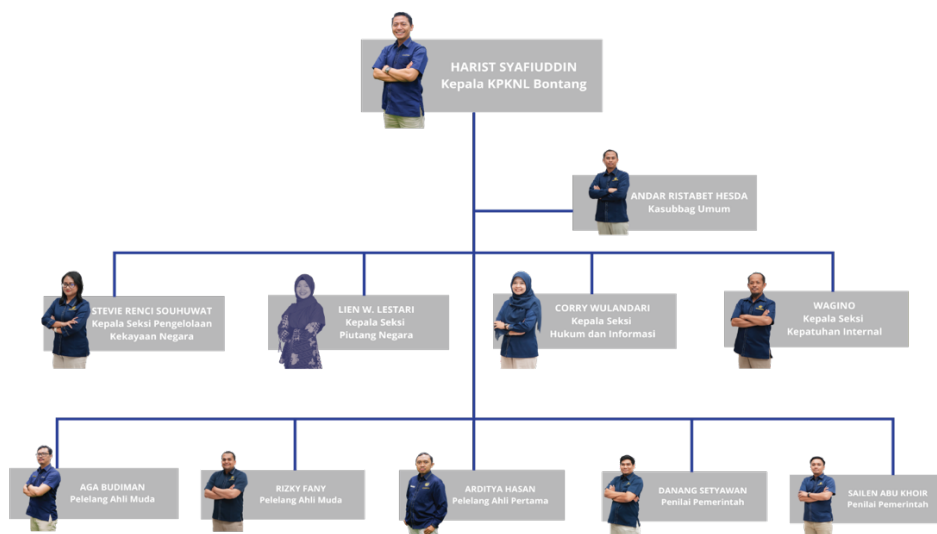
a. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.

- c. Seksi Piutang Negara
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d. Seksi Hukum dan Informasi
Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e. Seksi Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f. Jabatan Fungsional Pelelang
Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.
- g. Jabatan Fungsional Penilai
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Secara keseluruhan, jumlah pegawai KPKNL Bontang per 31 Desember 2024 sebanyak 24 (dua puluh empat). Komposisi pegawai KPKNL Bontang berdasarkan Tingkat pendidikan, golongan, umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

a. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
D I	3
D III	4
D IV/ S I	12
S II	5
TOTAL	24

b. Komposisi pegawai berdasarkan usia

Tingkat Kelompok Usia	Jumlah Pegawai
21 - 30	7
31 - 40	15
41 - 50	2
TOTAL	24

c. Komposisi pegawai berdasarkan generasi

Jenis generasi	Jumlah Pegawai
Gen Z	5
Millenial	17
Gen X	2

TOTAL	24
--------------	-----------

d. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat eselon

Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai
III	1
IV	5
Jabatan Fungsional	5
Pelaksana	13
TOTAL	24

e. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Pejabat Administrator	1
Pejabat Pengawas	5
Pelelang Ahli Muda	2
Pelelang Ahli Pertama	1
Penilai Ahli Pertama	2
Pelaksana	13
TOTAL	24

f. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tingkat Kelompok Usia	Jumlah Pegawai
Laki-laki	17
Wanita	7
TOTAL	24

g. Komposisi pegawai berdasarkan keahlian khusus

Setifikasi	Jumlah Pegawai
Pejabat Pembuat Komitmen	1
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	1
Bedahara Pengeluaran	2
Bendahara Penerimaan	1
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5
Juru Sita	1

ISU STRATEGIS

1) **Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan realisasi pokok Lelang. Salah satunya, dengan Perluasan basis Lelang Sukarela melalui ekstensifikasi objek Lelang hak menikmati dan permohonan lelang dari pelaku usaha.

2) **Pelaksanaan Lelang kontraktor PKP2B**

Di tahun 2024, KPKNL Bontang melakukan penjualan secara lelang atas BMN milik PT Kaltim Prima Coal (Kontraktor PKP2B) dengan pokok Lelang yang berhasil menyentuh angka sebesar Rp8,116 M.

3) **Coaching Clinic seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara secara aktif memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemangku kepentingan lingkup KPKNL Bontang per tiap triwulan. Asistensi dan pendampingan diberikan demi terwujudnya pengelolaan aset yang lebih maksimal serta pemahaman yang setara atas implementasi SIMAN V2 pada satker.

4) **Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah**

Percepatan Pensertipikatan BMN merupakan program nasional pemerintah. Program ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta seluruh Kementerian/Lembaga.

Mengawali semester II, KPKNL Bontang berkolaborasi dengan ATR/BPN Kota Bontang dalam memberikan bimbingan teknis akun mitra dan sentuh tanahku pada satker di lingkup kerja KPKNL Bontang.

5) **Coaching Clinic Jabatan Fungsional Pelelang**

Pelelang secara aktif memberikan bimbingan dan asistensi dalam mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan Lelang melalui portal Lelang V2.

6) **Pelimpahan Berkas Pengurusan Piutang Negara (BKPN) Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)**

Sepanjang Tahun 2024, KPKNL Bontang mendapatkan pelimpahan satu BKPN yang berasal dari Eks BPPN. Sampai dengan saat ini, pengurusan atas berkas tersebut telah dilakukan pemanggilan terakhir.

7) **Potensi PNBPN dari Pengurusan Piutang Negara**

Dua debitur dari BKPN penyerahan BPKAD Kabupaten Kutai Timur telah menandatangani Berita Acara Tanya Jawab dan sepakat untuk melakukan angsuran atas utang tersebut.

8) Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN

Otomatisasi Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa Sewa Pemanfaatan data pembandingan (Benchmark) yang berasal dari marketplace dan pihak eksternal lainnya.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Bontang dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP- 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu,

standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, optimal;

- b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat, ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Untuk mewujudkan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang best fit, pada tahun 2020-2024 KPKNL Bontang akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor KPKNL Bontang Nomor PK-04/WKN.13/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen Addendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-04A/WKN.13/2024 tanggal 31 Mei 2024 Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi:

- a. Perubahan Indikator Kinerja Utama
Perubahan terjadi pada IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara dari Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif. Setelah dilakukan addendum, target saldo BKN yang sebelumnya 77% (24 berkas) menjadi 74% (23 berkas).

b. Perubahan Rincian Target Kinerja

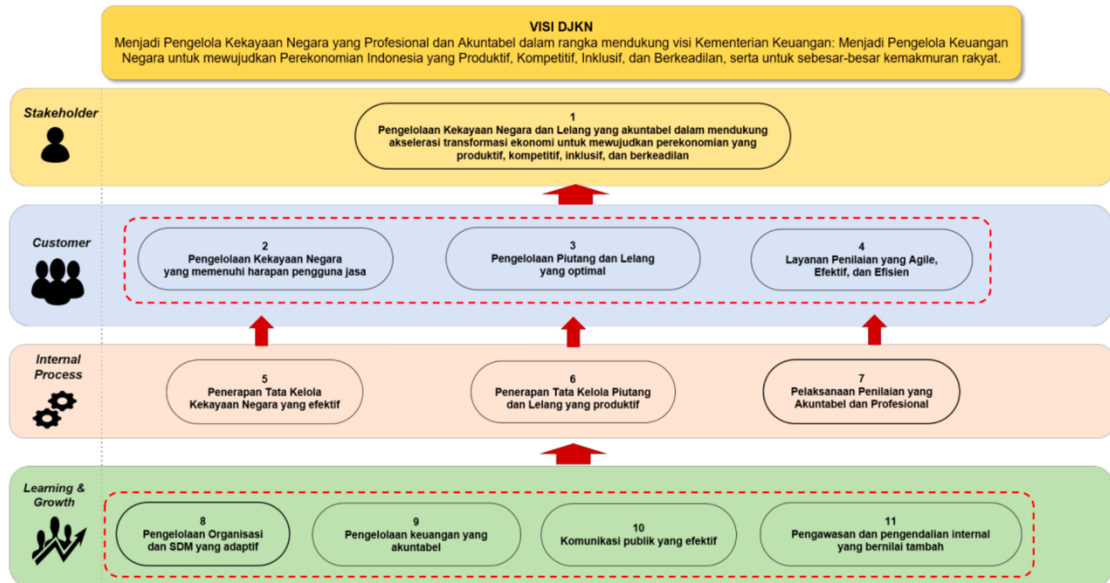
Dengan berubahnya IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara, Rincian target per triwulan atas IKU tersebut juga mengalami addendum.

Sebelum								
Kode IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Saldo BKPN	97%	90%	90%	81%	81%	77%	77%

Sesudah								
Kode IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Saldo BKPN	97%	90%	90%	81%	81%	74%	74%

Sasaran Strategis KPKNL Bontang termuat dalam Peta Strategi Bontang yang menerapkan 4 perspektif, yaitu : *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi



Dari Peta Strategi tersebut dikembangkan sebelas Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak dua puluh IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU disajikan dalam tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1b-CP	Indeks Integritas Organisasi	89.17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%

2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.5%
3	Pengelolaan piutang dan lelang yang Optimal	
3a-CP	Presentase realisasi pokok lelang	100%
3b-CP	Presentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	
5a-CP	Presentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5b-CP	Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif	
6a-CP	Presentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)	77%
6b-CP	Presentase produktivitas lelang	89%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko	85
8b-CP	Presentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
8c-N	Persentase akurasi data HRIS	90%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%
10	Komunikasi publik yang efektif	
10b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Bontang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja di KPKNL Bontang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN KK

ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA KPKNL BONTANG TAHUN 2024								
No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024		Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Target Kinerja pada PK KPKNL Bontang	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Indeks Integritas	91.5 (Skala 100)	Indeks Integritas	91.5 (Skala 100)	Indeks Integritas	91	Indeks integritas organisasi	89,17 (Skala 100)
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
4	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	80	-	-	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	80	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5%

5	Presentase Hasil Lelang	100	-	-	Persentase pencapaian hasil Lelang	100	Presentase realisasi pokok lelang	100%
6	-	-	-	-	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Presentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%
7	-	-	-	-	-	-	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
8	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100	-	-	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100	Presentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
9	-	-	-	-	-	-	Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	-	-	-	-	-	-	Presentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)	77%
11	Persentase Produktivitas Lelang	34	-	-	Persentase Produktivita Lelang	36	Presentase produktivitas lelang	89%

12	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	27	-	-	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	27	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%
13	-	-	-	-	-	-	Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko	85
14	-	-	-	-	-	-	Presentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
15	-	-	-	-	-	-	Persentase akurasi data HRIS	90%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
17	-	-	-	-	-	-	Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10%
18	-	-	-	-	-	-	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80
19	-	-	-	-	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	80	Indeks efektivitas UKI	82

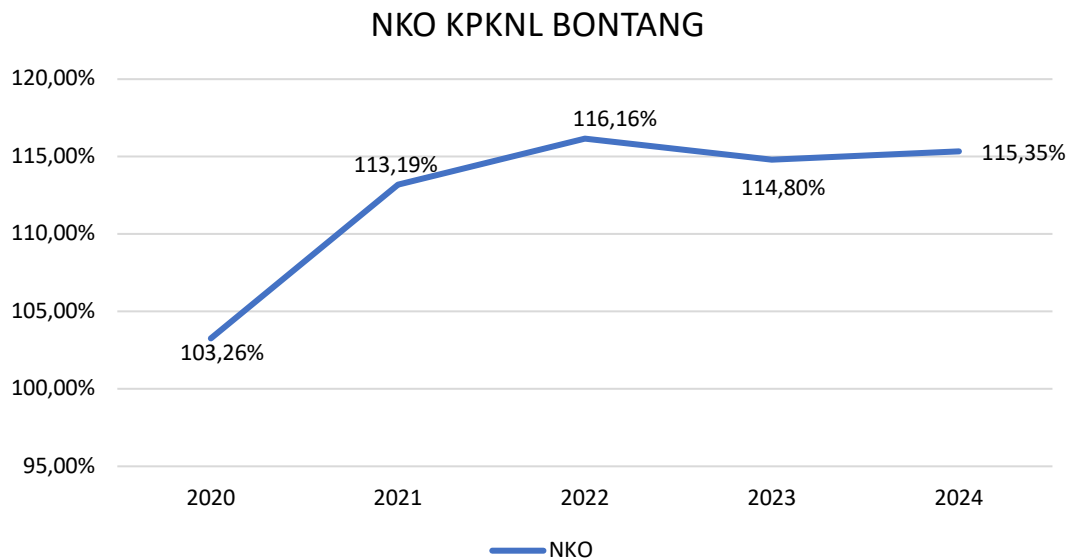
20	-	-	-	-	-	-	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/ WBBM	100
----	---	---	---	---	---	---	---	-----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh KPKNL Bontang menunjukkan hasil yang cukup stabil. Selama tahun 2020-2024, perolehan NKO rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 112,55%. Hal ini menunjukkan, perolehan NKO KPKNL Bontang selalu mendapat predikat “Istimewa” berdasar pada penetapan sebaran predikat kinerja.



NKO terkecil yang diperoleh KPKNL Bontang terjadi di Tahun 2020 sebesar 103.26%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melemahkan semua sektor global. Sedangkan NKO tertinggi dalam lima tahun terakhir, diperoleh pada Tahun 2022 sebesar 116,16%.

Penjelasan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bontang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada table sebagai berikut. .

Tahun	Sasaran Strategis	IKU Kemenkeu Three	NKO	Keterangan (IKU Implementasi yang tidak memenuhi target)
2020	12	20	103,26%	Terdapat 2 IKU Implementasi berwarna merah : - IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan realisasi sebesar 76,71% dari target sebesar 100% -IKU Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) dengan realisasi sebesar 56,91% dari target sebesar 100%
2021	10	22	113,19%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 91,44% dari target sebesar 95,5%
2022	11	20	116,16%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 92,20% dari target sebesar 95,5%
2023	10	20	114,80%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 97,99% dari target sebesar 100%
2024	11	20	115,35%	-

NKO KPKNL Bontang di Tahun 2024 sebesar 115.35% mengalami kenaikan sebesar 0,52% dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif. *Stakeholder perspective* dengan bobot 30%, *customer perspective* dengan bobot 20%, *internal business process* dengan bobot 25% dan *learning and growth* dengan bobot 25%.

Di tahun 2024, KPKNL Bontang memiliki capaian 20 IKU berstatus hijau. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Target penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada Tahun 2024 sebesar Rp7.251.750.000 dengan realisasi sebesar Rp8.803.396.672. Adapun rinciannya sebagai berikut.

a. PNBP dari Pengelolaan BMN

PNBP Pengelolaan BMN dengan target sebesar Rp4.450.000.000 berhasil tercapai sebesar Rp5.881.126.173. Capaian PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara didominasi oleh Pendapatan BLU Lainnya yang berkontribusi sebesar 57% dari total capaian. Selanjutnya, diikuti oleh Pemanfaatan BMN (23,8%) , Penjualan Barang Rampasan/ Hasil Sitaan (13,5%) dan Pemindahtanganan BMN (5,7%).

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang - PNBP BMN							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	392,28%	222,22%	222,22%	154,89%	154,89%	132,16%	132,16%	
Capaian	392,28%	222,22%	222,22%	154,89%	154,89%	132,16%	132,16%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dan mendorong satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama melalui pemanfaatan BMN yang belum digunakan sesuai tusi.
- 2) berkoordinasi dan mendorong satker untuk mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat melalui penjualan Lelang
- 3) berkoordinasi dengan KPPN Samarinda dan Tanjung Redeb untuk mendapatkan data realisasi PNBP

b. PNBP dari Pengurusan Piutang Negara/Daerah

PNBP Piutang Negara dengan target sebesar Rp1.750.000 dan capaian sebesar Rp4.563.406. PNBP ini berasal dari pengurusan piutang negara

berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Selama tahun 2024, terjadi pelonjakan penerimaan PNBPN Piutang Negara yang cukup signifikan. Dua BKPN baru penyerahan BPKAD Kutai Kartanegara melakukan angsuran piutang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang - PNBPN Piutang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	326,29%	189,99%	189,99%	106,17%	106,17%	260,77%	260,77%	
Capaian	326,29%	189,99%	189,99%	106,17%	106,17%	260,77%	260,77%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	106,17%	106,17%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait Crash Program Keringanan Utang kepada Penanggung hutang di wilayah Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

c. PNBPN dari Lelang

PNBPN Lelang dengan target sebesar Rp2.800.000.000 dengan capaian sebesar Rp2.917.843.073. Capaian PNBPN Lelang dilihat dari capaian PNBPN Pejabat Lelang Kelas I dan capaian lelang pegadaian. Adapun di tahun 2024, capaian PNBPN lelang Pejabat Lelang Kelas I berhasil tercapai sebesar Rp960.100.729

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang - PNBPN Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	212,73%	100,47%	100,47%	76,64%	76,64%	104,17%	104,17%	
Capaian	212,73%	100,47%	100,47%	76,64%	76,64%	104,17%	104,17%	
Nilai Kinerja	120%	100,47%	100,47%	76,64%	76,64%	104,17%	104,17%	

Penyumbang PNPB lelang PL I terbesar selama tahun 2024 jika dilihat dari jenis lelangnya adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diikuti Lelang Non Eksekusi Wajib BMN dan Lelang Non Eksekusi Wajib BMD.

Nilai hasil pelayanan Lelang yang diupayakan oleh KPKNL dirangkum sebagai berikut.

Bea Lelang Laku	Rp908.670.729
Bea Permohonan Lelang	Rp44.700.000
Bea Lelang Batal	Rp4.000.000
Uang Jaminan Lelang Wanprestasi	Rp2.730.000
TOTAL	Rp960.100.729

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dan penggalan potensi Lelang pada perbankan, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

2. Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

- a. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- b. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Capaian IKU ini diberikan langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI. Hasil capaian IKU Indeks Integritas periode triwulan IV tahun 2024 untuk seluruh unit kerja DJKN adalah sebesar 92,44 (mengalami peningkatan 3,27 poin dibandingkan tahun 2023 89,17) dan menghasilkan indeks capaian tahunan sebesar 103,67%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	MAX/ TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	100%	100%	100%	140%	140%	103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	103,67%	103,67%	

Dalam mendukung capaian IKU, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan KPKNL Bontang meliputi.

- 1) pelaksanaan kegiatan terkait kerangka integritas sesuai jadwal dan arahan dari kantor pusat.
- 2) pelaksanaan pemantauan pengendalian utama, pemantauan kode etik dan perilaku serta pemantauan pengaduan masyarakat.
- 3) pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di lingkup KPKNL Bontang;
- 4) pembuatan pakta integritas untuk perjalanan dinas.

Dalam memitigasi keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan yang wajib dilaksanakan akan disusun jadwal dan rencana kerja tahun di tahun 2025.

3. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

IKU ini mengukur kesesuaian BMN pada Satker dengan ketentuan SBSK. Target tahun 2024 pada KPKNL Bontang adalah sebanyak 373 NUP Pengukuran baru dan 166 NUP optimalisasi. IKU berhasil tercapai sebesar 114,37%.

Capaian atas IKU belum maksimal dikarenakan beberapa satker belum menggunakan BMN yang sesuai peruntukannya. Disamping itu, terbatasnya petugas pendamping dari Satker mengakibatkan kegiatan pengukuran sedikit terkendala.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	MAX/ TLK
Realisasi	30%	97,55%	97,55%	85,39%	85,39%	81,78%	81,78%	
Capaian	100%	195,10%	195,10%	142,31%	142,31%	114,37%	114,37%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	114,37%	114,37%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan satker di wilayah kerja guna memberikan edukasi yang memadai terkait pelaksanaan pengukuran tingkat penggunaan BMN sesuai dengan SBSK.
- 2) melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan bagi satker yang menjadi target pengukuran kesesuaian BMN dengan SBSK.

4. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

IKU Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara berhasil direalisasikan sebesar 100% dengan indeks maksimal sebesar 115,61% dari target 86.5%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	MAX/ TLK
Realisasi	10%	94,12%	94,12%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	209,16%	209,16%	166,67%	166,67%	115,61%	115,61%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	115,61%	115,61%	

Jumlah persetujuan atau penetapan pengelolaan BMN selama periode 2024 sebanyak 18 NUP. Sepuluh NUP diantaranya berupa tanah/bangunan dan delapan lainnya selain tanah/bangunan. Polres Bontang menjadi satker dengan jumlah Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN terbanyak yang dikeluarkan pada tahun 2024. Rincian PSP BMN dapat dilihat sebagai berikut.

Satker	Jenis BMN	Jumlah BMN
Polres Bontang	T/B	6
KUPP Kelas II Sangkulirang	T/B	2
KUPP Kelas II Sangkulirang	Selain T/B	3
BPS Kutai Timur	Selain T/B	1
BPS Kabupaten Berau	Selain T/B	1
BPS Kota Bontang	T/B	2
BPS Kota Bontang	Selain T/B	1
Pengadilan Negeri Sangatta	Selain T/B	1
Pengadilan Agama Tanjung Redeb	Selain T/B	1
TOTAL		18

KPKNL Bontang terus melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan kepada satker terkait dengan penindaklanjutan persetujuan pengelolaan BMN.

5. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II) / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU presentase realisasi pokok lelang berhasil direalisasikan sebesar 104,68% dari target 100%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan piutang dan lelang yang optimal							Pol/KP
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	227,49%	109,32%	109,32%	79,77%	79,77%	104,68%	104,68%	
Capaian	227,49%	109,32%	109,32%	79,77%	79,77%	104,68%	104,68%	
Nilai Kinerja	120%	109,32%	109,32%	79,77%	79,77%	104,68%	104,68%	

Realisasi pokok lelang untuk lelang yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pelelang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp28.810.317.965 dari target sebesar Rp12.345.000.000. Realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp97.852.818.200 dari target sebesar Rp108.655.000.000.

Keseluruhan, realisasi pokok lelang adalah sebesar Rp126.663.136.165 atau sebesar 104,68% dari target total sebesar Rp121.000.000.000.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I	Rp12.345.000.000	Rp28.810.317.965	233%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp108.655.000.000	Rp97.852.818.200	90%
Jumlah	Rp121.000.000.000	Rp126.663.136.165	104,68%

Penyumbang pokok lelang PL I terbesar berasal dari permohonan lelang PT Kaltim Prima Coal yang mencapai 30,2% dari keseluruhan.

PT Kaltim Prima Coal	30,2%
Bank BRI	19,3%
Bank Mandiri	8,8%
Kurator	8,6%
BPKAD Berau	5,3%
Kejari Berau	4,2%
Lainnya	23,6%

Dalam memenuhi pencapaian target, KPKNL Bontang telah melakukan upaya maksimal sebagai berikut.

- 1) koordinasi rutin dan penggalan potensi lelang kepada perbankan, pemda dan instansi lainnya
- 2) proaktif dalam melakukan penggalan potensi lelang sukarela
- 3) pelaksanaan sosialisasi lelang hak menikmati dan sukarela

6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

IKU presentase penurunan outstanding piutang negara berhasil direalisasikan sebesar 120% dari target 100%.Capaian penurunan outstanding Piutang Negara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp181.623.402 dari target sebesar Rp69.880.000.

KPKNL Bontang	Pengelolaan piutang dan lelang yang optimal							Pol/KP
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	163,42%	103,32%	103,32%	120,60%	120,60%	259,91%	259,91%	
Capaian	163,42%	103,32%	103,32%	120,60%	120,60%	259,91%	259,91%	
Nilai Kinerja	120%	103,32%	103,32%	120%	120%	120%	120%	

Target IKU Penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain.

- 1) melakukan penagihan langsung ke debitur.
- 2) melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait crash program keringanan utang.
- 3) melakukan koordinasi dan penggalian BKPN kepada Penyerah Piutang di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penyelesaian layanan penilaian yang tepat waktu dapat mempercepat proses pemberian persetujuan bagi pengguna layanan yang berdampak pada optimalisasi PNBPN. Sepanjang tahun 2024, telah dihasilkan 95 laporan penilaian BMN. Laporan penilaian yang dihasilkan bertujuan untuk penyusunan LKPP, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

IKU Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara berhasil ter-realisis sebesar 92,92 dari target 75.

KPKNL Bontang	Birokrasi dan layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien							Pol/KP
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	75	75	75	75	75	75	75	MAX/ TLK
Realisasi	88,75	78,75	83,75	101,88	89,79	102,30	92,92	
Capaian	118,33%	105%	111,67%	135,84%	119,72%	136,40%	123,89%	
Nilai Kinerja	118,33%	105%	111,67%	120%	119,72%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan pemohon untuk melengkapi kelengkapan dokumen permohonan dan penentuan jadwal survei lapangan.

8. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2024 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. K1 : Clean and clear (data fisik dan yuridis lengkap dan tidak ada permasalahan hukum)
- b. K2 : Not Clean But Clear (data fisik dan data yuridis tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara)
- c. K3 : Clean But Not Clear (data fisik dan data yuridis lengkap sengketa/berperkara)
- d. K4 : Sudah bersertipikat namun belum diupdate pada master aplikasi SIMAN

Total bidang tanah yang disertipikatkan KPKNL Bontang pada tahun 2024 sebanyak 88 bidang dari target sebesar 76. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.

K1	21
K2	-
K3	64
K4	3
TOTAL	88

IKU ini berhasil direalisasikan dengan nilai akhir sebesar 115,79%.

KPKNL Bontang	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							PoI/KP
	5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	20%	51,32%	51,32%	78,95%	78,95%	115,79%	115,79%	
Capaian	100%	128,29%	128,29%	131,58%	131,58%	115,79%	115,79%	

Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	115,79%	115,79%	
---------------	------	------	------	------	------	---------	---------	--

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan satker dan BPN setempat terkait pelaksanaan sertifikasi
- 2) melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah secara rutin dengan pihak kantor pertanahan dan satker
- 3) melakukan sosialisasi secara luring dengan mengundang ATR/BPN Kota Bontang sebagai narasumber dalam bimbingan teknis akun mitra dan sentuh tanahku

9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Kinerja aset BMN diukur secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator yang meliputi

- a. kepentingan umum;
- b. manfaat sosial;
- c. kepuasan pengguna;
- d. potensi penggunaan masa mendatang;
- e. kelayakan finansial; dan
- f. kondisi teknis.

IKU ini berhasil direalisasikan dengan nilai akhir sebesar 120%.

KPKNL Bontang	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	23,13%	44,87%	44,87%	89,13%	89,13%	130,26%	130,26%	
Capaian	231,20%	140,22%	140,22%	111,41%	111,41%	130,26%	130,26%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	111,41%	111,41%	120%	120%	

IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) meliputi komponen evaluasi kinerja aset yang disampaikan rekomendasinya tercapai sebesar 113 NUP dan komponen tindak lanjut rekomendasi tercapai sebesar 8 NUP.

KPKNL Bontang terus melakukan koordinasi dan pemantauan kepada satker terkait untuk melakukan pengukuran portofolio BMN di wilayah kerjanya.

10. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- BKPN lunas (SPPNL)
- BKPN penarikan (SPPNS)
- BKPN dikembalikan (SKPBN)
- BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
- Koreksi data BKPN

Jumlah saldo BKPN yang terselesaikan di 2024 sebanyak 14 berkas dari total berkas berjumlah 31 berkas. Sepuluh berkas diterbitkan SPPNL dan empat berkas lainnya diterbitkan PSBDT.

IKU ini berhasil direalisasikan sebesar 120% dari target sebesar 97%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi data minimize.

KPKNL Bontang	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							Pol/KP
	6a-CP Presentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	MIN/ TLK
Target	97%	90%	90%	81%	81%	74%	74%	
Realisasi	93,55%	87,10%	87,10%	74,19	74,19%	58,06%	58,06%	
Capaian	103,56%	103,22%	103,22%	108,41%	108,41%	121,53%	121,53%	
Nilai Kinerja	103,56%	103,22%	103,22%	108,41%	108,41%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang dan melakukan upaya penagihan langsung, penerbitan surat paksa dan sosialisasi Crash Program Keringanan Utang.

11. Persentase Produktivitas Lelang

IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi Lelang.

Sepanjang tahun 2024, terdapat 4 (empat) jenis lelang yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I. Lelang tersebut meliputi, lelang non eksekusi sukarela, lelang non eksekusi wajib, lelang eksekusi hak

tanggung dan lelang eksekusi selain hak tanggungan. Jumlah frekuensi lelang yang telah dilaksanakan sebanyak 564. Dari pelaksanaan tersebut, 51% nya TAP (Tidak Ada Penawaran).

Secara keseluruhan, persentase produktivitas lelang ter-realisis sebesar 120% dari target sebesar 89%. IKU ini memperhitungkan dua komponen, yaitu realisasi komponen lelang laku dengan bobot 40% dan komponen frekuensi lelang bobot sebesar 60%.

KPKNL Bontang	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							Pol/KP
	6a-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	MAX/ TLK
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	
Realisasi	50,86%	48,64%	48,64%	96,31%	96,31%	120%	120%	
Capaian	169,53%	108%	108%	160%	160%	134,83%	134,83%	
Nilai Kinerja	120%	108%	108%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemohon lelang, melakukan publikasi info lelang melalui media sosial dan menyampaikan informasi SOP lelang.

12. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tujuan yang ingin dicapai dari Implementasi IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien. IKU berhasil direalisasikan sebesar 120% dari target 16%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi data minimize. Semakin rendah capaian, semakin baik.

KPKNL Bontang	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							Pol/KP
	7a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	MIN/ TLK
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target, Penilai KPKNL Bontang selalu melakukan review terhadap laporan penilaian dan melakukan kaji ulang.

13. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko

IKU ini memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

IKU memperoleh nilai sebesar 115,67% dari target sebesar 85%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							Pol/KP
	8a-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	MAX/ TLK
Target	85	85	85	85	85	85	85	
Realisasi	100	96,75	96,75	98,24	98,24	98,32	98,32	
Capaian	118%	114%	114%	116%	116%	115,67%	115,67%	
Nilai Kinerja	118%	114%	114%	116%	116%	115,67%	115,67%	

Kedepannya, Seksi Kepatuhan Internal akan melakukan monitoring capaian kinerja organisasi dan menyampaikan laporannya secara berkala.

14. Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. SDM dikembangkan melalui pelatihan dan pelaksanaan rencana pengembangan pegawai, serta sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

IKU tercapai dengan perolehan sebesar 120% dari target 75%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							Pol/KP
	8b-CP Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	MAX/ TLK
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	
Realisasi	84,24%	119%	119%	119%	119%	113%	113%	
Capaian	187,20%	198%	198%	148,75%	148,75%	125,56%	125,56%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) menghimbau seluruh pegawai untuk menyusun IDP dan melaksanakan IDP dimaksud.
- 2) menghimbau pegawai untuk mengajukan usulan pelatihan pada Aplikasi Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- 3) mengkoordinasikan bersama seluruh pegawai terkait pelaksanaan pembinaan mental setiap triwulannya.

15. Persentase Akurasi Data HRIS

IKU bertujuan untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai terhadap data pegawai yang selalu mutakhir. IKU tercapai sebesar 111% dari target sebesar 90%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	8c-N Persentase akurasi data HRIS							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	AVERAGE
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	
Nilai Kinerja	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) menghimbau seluruh pegawai untuk melakukan akurasi data HRIS pada awal bulan.
- 2) monitoring pelaksanaan akurasi data pegawai tiap bulannya.
- 3) menginformasikan kembali bagi para pegawai yang belum memutakhirkan data.

16. Indeks Kinerja Anggaran

Anggaran yang tersedia pada setiap satuan kerja harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapaiannya output, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. Sesuai ketentuan yang berlaku, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang memperoleh alokasi pagu sebesar

Rp7.270.494.000,00 yang tercantun dalam DIPA Nomor SP-DIPA-015.09.2.506370/2024 Tanggal 24 November 2023.

Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Anggaran bertujuan untuk memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik. Adapun dasar perhitungan IKU Indeks Kinerja Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7). Formula perhitungan realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran untuk masing-masing triwulan adalah sebagai berikut.

a. Triwulan I dan II = 100% dari nilai IKPA dengan target 95,0
= Realisasi IKPA/ 95

b. Triwulan III dengan indeks sebagai berikut

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15$ * $(95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5$ ** $(85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

c. Triwulan IV = 50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (Indeks 100), dengan indeks sebagai berikut

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2$ * $(91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55$ ** $(80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

Pada triwulan IV tahun 2024, KPKNL Bontang memperoleh NKA sebesar 95,84, sehingga berdasarkan table di atas hasil konversi realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran mencapai 120. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang mendapatkan indeks capaian 114,6. Adapun histori indeks capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran selama tiga tahun kebelakang adalah sebagai berikut:

Indeks Capaian Tahun 2022			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
94,78	104,43	104,43	96,54
Indeks Capaian Tahun 2023			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
114,60	114,60	114,60	93,58
Indeks Capaian Tahun 2024			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
103,91	98,15	89,72	120

KPKNL Bontang	Pengelolaan Keuangan Yang Akutanbel							
	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	103,91	98,15	98,15	89,72	89,72	120,00	120,00	
Capaian	103,91	98,15	98,15	89,72	89,72	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	103,91%	98,15%	98,15%	89,72%	89,72%	120,00%	120,00%	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Kinerja Anggaran, terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) melaksanakan revisi anggaran secara responsif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 2) mengoptimalkan capaian output serta memperhatikan batas waktu pengisian pada Aplikasi SAKTI; dan
- 3) menjaga kualitas penyerapan anggaran, pelaksanaan rencana penarikan dana, dan tata kelola UP/TUP/SPM dengan melakukan monitoring secara mingguan.

Selain itu, pada tahun 2024, KPKNL Bontang juga telah menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 yang tertuang dalam S-1023/MK.02/2024 tanggal

7 November 2024 hal Langkah-Langkah Strategis Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 terkait dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas..

17. Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dari SS Pengelolaan Keuangan yang akuntabel ter-realisis sebesar 0% dari target 10%. Dalam memaksimalkan pencapaian target, pengisian dan monitoring data dropbox serta focusPN dilakukan setiap akhir bulan antara pelelang, admin *dropbox* serta bendahara penerimaan.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	MIN/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

18. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)

IKU ini untuk mengukur ketepatan waktu pemberian layanan informasi publik pada Unit PPID Tk. III/KPKNL, ketepatan dan kelengkapan penyampaian laporan pengelolaan informasi/PPID serta penyediaan data/informasi serta merta, berkala, dan yang harus ada pada website DJKN/KPKNL.

KPKNL Bontang	Komunikasi publik yang efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Selama Tahun 2024, tidak ada permintaan atas informasi publik. Kendati demikian, Seksi Hukum dan Informasi telah mengupayakan pemberian layanan informasi yang memudahkan para pengguna, seperti :

- 1) Penyediaan form permintaan informasi publik pada Area Pelayanan Terpadu (APT), APT Online maupun pada website.
- 2) Pencatuman daftar informasi publik yang wajib diumumkan, serta merta dan berkala pada website kantor

- 3) Penyematan link proses alur PPID serta form pengajuan layanan informasi public
- 4) Menetapkan SK Tim PPID Tk. III
- 5) Memberikan tanggapan atas permohonan dari pihak eksternal
- 6) Penyampaian Laporan PPID KPKNL Bontang berkala setiap tahunnya

19. Indeks Efektivitas UKI

Upaya mewujudkan penguatan dan peningkatan kualitas Unit Kepatuhan Internal DJKN dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas yang memadai. Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki sebelas unsur penilaian, yakni:

- a. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi;
- b. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE);
- c. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA);
- d. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP);
- e. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS);
- f. Penyusunan Profil Pegawai;
- g. Penyusunan Simpulan dan LPPI;
- h. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
- i. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI;
- j. Kepuasan Stakeholders, dan
- k. Hasil Survei Penilaian Integritas. Upaya mewujudkan penguatan dan peningkatan kualitas Unit Kepatuhan Internal DJKN dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas yang memadai.

IKU berhasil tercapai sebesar 114,34% dari target 82%.

KPKNL Bontang	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							PoI/KP
	11a-N Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q21	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	MAX/ TLK
Target	5	15	15	20	20	82,00	82,00	
Realisasi	5	15	15	20	20	93,76	93,76	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	114,34%	114,34%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	114,34%	114,34%	

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU meliputi :

- 1) Melakukan pemantauan pengendalian utama
- 2) Melakukan pemantau kode etik dan kode perilaku pegawai
- 3) Melaksanakan pekan disiplin

- 4) Pemantauan pengaduan Masyarakat, benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi
- 5) Penyusunan profil pegawai

20. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/ WBBM

IKU ini memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2024, KPKNL Bontang masuk dalam kategori keberlanjutan predikat WBBM.

KPKNL Bontang	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan ZI WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q21	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU meliputi :

- 1) menyampaikan dokumen rencana kerja, kegiatan dan monev ZI WBBM sejak tahun 2023
- 2) melakukan submit data pada aplikasi DIA
- 3) monitoring kegiatan agen perubahan per triwulannya.

REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 KPKNL Bontang dengan nomor DIPA SP-DIPA-015.09.2.506370/2024 Tanggal 24 November 2023 mempunyai pagu sebesar Rp7.270.494.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan akumulasi penyerapan total mencapai 99,53%, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jenis Belanja		Total
	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu	Rp1.878.379.000	Rp5.392.115.000	Rp7.270.494.000
Realisasi	Rp1.851.524.787	Rp5.385.025.993	Rp7.236.550.780
Persentase	(98.57%)	(99.87%)	(99.53%)

Serta pada Tahun Anggaran 2024 terdapat dua jenis sumber dana yaitu Rumiah Murni (RM) serta Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian sebagai berikut.

Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja		Total
		Belanja Barang	Belanja Modal	
RM	Pagu	Rp1.740.696.000	Rp5.386.035.000	Rp7.126.731.000
	Realisasi	Rp1.717.018.428	Rp5.381.068.897	Rp7.098.087.325
	Persentase	(98.64%)	(99.91%)	(99.60%)
PNBP	Pagu	Rp137.683.000	Rp6.080.000	Rp143.763.000
	Realisasi	Rp134.506.359	Rp3.957.096	Rp138.463.455
	Persentase	(97.69%)	(65.08%)	(96.31%)

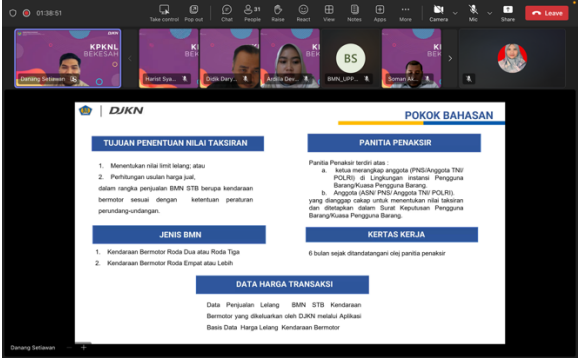

Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang sejalan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pada tahun 2024, KPKNL Bontang memiliki 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan, 11 (sebelas) klasifikasi rincian output, serta 22 (dua puluh dua) rincian output, dengan capaian setiap rincian output sebagai berikut.

No.	Rincian Output	Pagu	Realisasi	(%)	Target		Total
1	Layanan Bantuan Hukum	Rp9.200.000	Rp8.985.114	98%	1	Layanan	1
2	Kerumahtangaan	Rp102.560.000	Rp96.043.325	94%	12	Layanan	12
3	Layanan Perkantoran	Rp1.411.226.000	Rp1.401.562.894	99%	12	Layanan	12

4	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp220.745.000	Rp214.605.993	97%	62	Unit	62
5	Kendaraan Bermotor	Rp751.420.000	Rp751.420.000	100%	4	Unit	4
6	Gedung/Bangunan	Rp4.419.950.000	4.419.000.000	100%	320	m2	320
7	Pembinaan/Edukasi Publik	Rp16.239.000	Rp16.097.100	99%	69	Orang	78
8	Kehumasan	Rp12.816.000	Rp11.922.000	93%	30	Kegiatan	30
9	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp12.216.000	Rp11.662.262	95%	5	Dokumen	11
10	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp12.925.000	Rp10.016.000	77%	45	Orang	45
11	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	Rp8.224.000	Rp8.161.181	99%	25	Orang	30
12	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	Rp5.049.000	Rp4.969.000	98%	60	Orang	62
13	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp25.488.000	Rp24.842.766	97%	48	Surat Keputusan	43
14	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp25.480.000	Rp25.369.814	100%	6	Surat Keputusan	13
15	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	Rp32.850.000	Rp32.811.724	100%	92	Rekomendasi Kebijakan	113
16	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Rp12.240.000	Rp12.032.000	98%	289	Rekomendasi Kebijakan	382
17	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	Rp50.000.000	Rp49.570.649	99%	25	UMKM	25
18	Risalah Lelang	Rp28.714.000	Rp28.648.883	100%	120	Dokumen	264
19	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	Rp11.640.000	Rp10.831.792	93%	1	Rekomendasi	2
20	Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp11.968.000	Rp11.696.000	98%	1	Rekomendasi	2

21	Penggalian Potensi Lelang	Rp53.920.000	Rp51.317.827	95%	2	Rekomend asi	22
22	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PU)	Rp35.624.000	Rp34.984.456	98%	58	Rekomend asi	83

INOVASI

No.	Narasi	Keterangan
1	<p>KPKNL Bekesah</p> <p>Kegiatan bincang-bincang dan sharing session yang dilaksanakan setiap triwulan sekali dengan berbagai topik terkait tugas dan fungsi KPKNL yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan. KPKNL Bekesah sebagai upaya dalam meningkatkan <i>engagement</i> antara KPKNL Bontang dengan para pengguna layanan.</p>	
2	<p>Pengembangan Medsos</p> <p>Pengembangan konten media sosial KPKNL Bontang bertujuan untuk meningkatkan exposure media sosial kantor kepada pengguna dunia maya. Diharapkan, konten-konten yang dibuat dapat menarik minat dan meningkatkan pemahaman atas tuisi DJKN.</p>	
4	<p>Pakta Integritas</p> <p>Dokumen yang berisi komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan dan bebas korupsi. Dokumen dipergunakan untuk keperluan perjalanan dinas pegawai.</p>	

PENGHARGAAN DAN ACHIEVEMENT

Di tahun 2024, KPKNL Bontang mendapat kesempatan dalam mempertahankan kembali predikat WBBM. Hal ini disampaikan melalui Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait, mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Bontang serta upaya peningkatan good governance yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020- 2024.

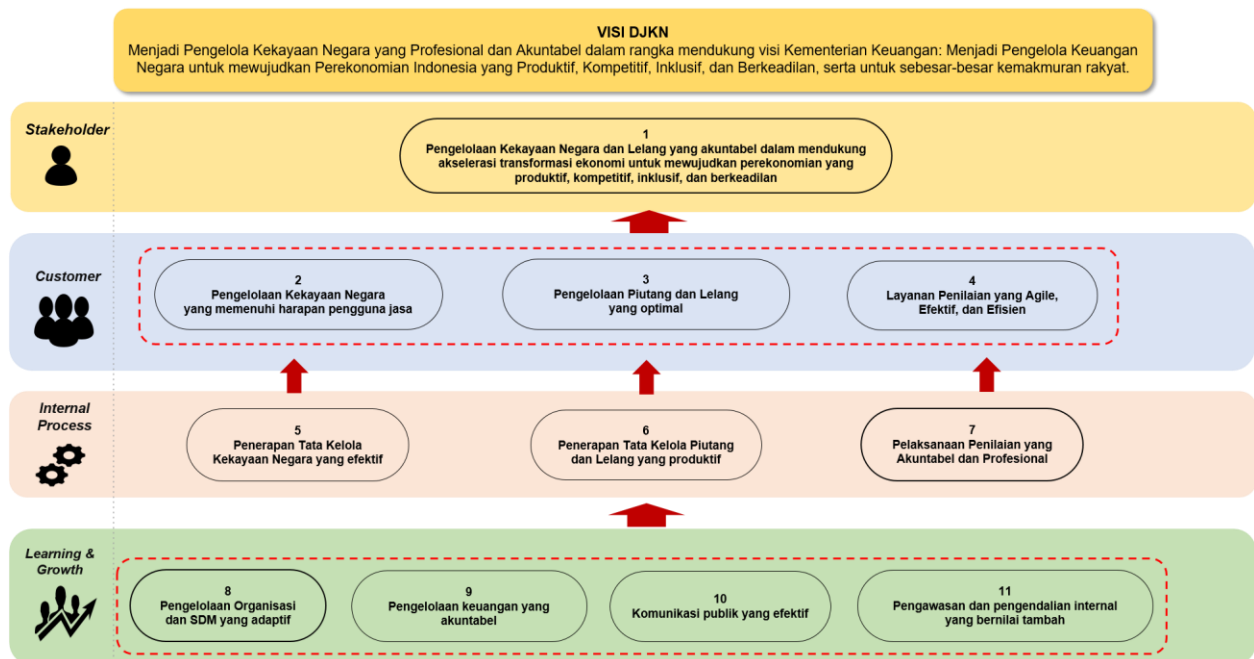
Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Bontang pada tahun 2024 secara umum dapat dikatakan baik dan dari target 20 IKU yang telah ditetapkan, hampir secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,53%.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Bontang untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya KPKNL Bontang dalam memberikan pelayanan terbaik.

Penyusunan laporan kinerja ini diakui masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, KPKNL Bontang siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk segala perbaikan di masa yang akan datang.

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.13/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG
BONTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp 6.80 M)
		1b-CP Indeks integritas organisasi	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%
		2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.5%
3	Pengelolaan piutang dan lelang yang Optimal	3a-CP Presentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 121 M)
		3b-CP Presentase penurunan outstanding Piutang Negara	100% (Rp 69.880.000)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP Presentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif	6a-CP Presentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)	77% (24 Berkas)
		6b-CP Presentase produktivitas lelang	89%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	7a-CP Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko	85

		8b-CP Presentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
		8c-N Persentase akurasi data HRIS	90%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi publik yang efektif	10b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program :

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp 314.122.000

Kegiatan :

1. Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi Rp 26.198.000
2. Pengelolaan Aset Rp 287.924.000

Program :

Dukungan Manajemen Rp 6.913.992.000

Kegiatan :

1. Legislasi dan Litigasi Rp 9.200.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp 6.863.521.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp 29.055.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp 12.216.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang



Ditandatangani Secara Elektronik

Harist Syafiuddin



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	50%	50%	50%	71.5%	71.5%	71.5%	71.5%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86.5%	86.5%	86.5%
3	Pengelolaan piutang dan lelang yang Optimal							
3a-CP	Presentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Presentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
5a-CP	Presentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	15%	20%	25%	45%	100%	100%
5b-CP	Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	20%	30%	30%	60%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif							
6a-CP	Presentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)	97%	90%	90%	81%	81%	77%	77%
6b-CP	Presentase produktivitas lelang	-	44%	44%	-	-	89%	89%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-CP	Presentase pengembangan kompetensi pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
8c-N	Persentase akurasi data HRIS	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi publik yang efektif							
10b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Bontang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase Realisasi Pookok Lelang	Perluasan basis Lelang Sukarela melalui ekstensifikasi objek lelang hak menikmati dan permohonan lelang dari pelaku usaha	Jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati Jumlah pelaksanaan dan hasil sukarela dari pelaku usaha	Q1. Pemetaan potensi audiensi/sosialisasi dan asistensi	Daftar Potensi Lelang	Q1 sd Q4	Jabatan Fungsional Pelelang	
				Q2. Pemetaan potensi, audiensi/sosialisasi dan asistensi	Daftar Potensi Lelang			
				Q3. Pelaksanaan Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang/ tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati; Minuta Risalah Lelang			
				Q4. Pelaksanaan Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang/ tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati; Minuta Risalah Lelang			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Harist Syafiuddin	NAMA	Jose Arif Lukito	
NIP	197802222002121002	NIP	197109121996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp 6.80 M)	Penerima Layanan

		Indeks Integritas Organisasi	89,17	Penguatan Internal atau Anggaran
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp 121 M)	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% Rp 69.880.000	Penerima Layanan
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)	77% (24 Berkas)	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	Proses Bisnis
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran

	Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase akurasi data HRIS	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80	Penerima Layanan
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Harist Syafiuddin
197802222002121002

30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
197109121996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	23 Pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	50%	50%	50%	71.5%	71.5%	71.5%	71.5%
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86.5%	86.5%	86.5%
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75

8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	5%	15%	20%	25%	45%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	20%	30%	30%	60%	100%	100%
10	Persentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)	97%	90%	90%	81%	81%	77%	77%
11	Persentase Produktivitas Lelang	-	44%	44%	-	-	89%	89%
12	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
13	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	85	85	85	85	85	85	85
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
15	Persentase akurasi data HRIS	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

- | | |
|----|--|
| 2. | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |
|----|--|

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Harist Syafiuddin
197802222002121002

30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
197109121996031001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 04B/WKN.13/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-04/WKN.13/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-04A/WKN.13/2024 tgl 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	77% (24 berkas)	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74% (23 berkas)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	77%	77%	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	74%	74%

Samarinda, 20 November 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	77% (24 berkas)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74% (23 berkas)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	77%	77%	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	74%	74%

Samarinda, 20 November 2024

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Harist Syafiuddin



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

PERIODE SD TRIWULAN IV

TAHUN 2024

Kode	Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
		Stakeholder Perspective(30%)							33,18%
1	1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							110,60%
1a-CP	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121,40%	14%	42%	121,40%	120,00%
1b-CP	1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89,17	92,44	19%	58%	104%	103,67%
		Customer Perspective(20%)							22,73%
2	2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							114,99%
2a-CP	2a-CP	Persentase tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	P/L	71,50%	81,78%	19%	50%	114,37%	114,37%
2b-CP	2b-CP	Persentase tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/L	86,50%	100%	19%	50%	115,61%	115,61%
3	3	Pengelolaan piutang dan lelang yang optimal							112,34%
3a-CP	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	104,68%	14%	50%	104,68%	104,68%
3b-CP	3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	259,91%	14%	50%	259,91%	120,00%
		Internal Process Perspective (25%)							29,67%
4	4	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							120,00%
4a-CP	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	92,92	14%	100%	123,89%	120,00%
5	5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							117,89%
5a-CP	5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	115,79%	14%	50%	115,79%	115,79%
5b-CP	5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	130,26%	14%	50%	130,26%	120,00%
6	6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif							120,00%
6a-CP	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	74%	58,06%	14%	50%	121,53%	120,00%
6b-CP	6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	120,00%	14%	50%	135%	120,00%
7	7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							120,00%
7a-CP	7a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0%	14%	100%	200%	120,00%
8	8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							115,59%
8a-CP	8a-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85	98,32	14%	33,33%	115,67%	115,67%
8b-CP	8b-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90%	113%	14%	33,33%	125,56%	120,00%
8c-N	8c-N	Persentase Akurasi Data HRIS	P/M	90%	100%	14%	33,33%	111,11%	111,11%
		Learning and Growth Perspective (25%)							29,76%
9	9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00%
9a-CP	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%
9b-CP	9b-CP	Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	P/M	10%	0%	14%	50%	200%	120,00%
10	10	Komunikasi publik yang efektif							120,00%
10a-N	10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	100	14%	100%	125%	120,00%
11	11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							117,17%
11a-N	11a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82	93,76	14%	50%	114%	114,34%
11b-N	11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	P/M	100	120	14%	50%	120%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									115,35%